BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada awal berdiri, Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang bernama Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang didirikan pada tahun 1971 sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan nama biro keuangan.

Biro keuangan tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu:

1. Bagian Anggaran
2. Bagian Penghasilan
3. Bagian Keuangan

Pada tahun 1972 terjadi perubahan dalam susunan organisasi Pemerintah Daerah yaitu untuk bagian penghasilan daerah harus berdiri sendiri dengan nama Dinas Perpajakan dan Pendapatan Daerah yang dihasilkan dengan peraturan daerah No. 1 tahun 1972, tanggal Oktober 1974 ditetapkan dengan SK Bupati No.20/UP/1974 tentang Pembentukan Dinas Perpajakan dan Pendapatan Daerah.

Tahun 1979 susunan organisasi Dinas Perpajakan dan Pendapatan Daerah disempurnakan dengan pembentukan nama menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah TK. II Sumedang, dengan Perda Kabupaten Sumedang No.5

tahun 1979 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah TK. II Sumedang.

Kemudian pada tahun 1991 ada penyempurnaan kembali mengenai Perda tersebut dengan Perda No.7 tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Keputusan Bupati Sumedang No.19 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Pada Tanggal 2 Februari 2006 terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah dimana Dinas Pendapatan Daerah berganti nama Dinas Pajak Kabupaten Sumedang yang di sah kan dengan Perda No.7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

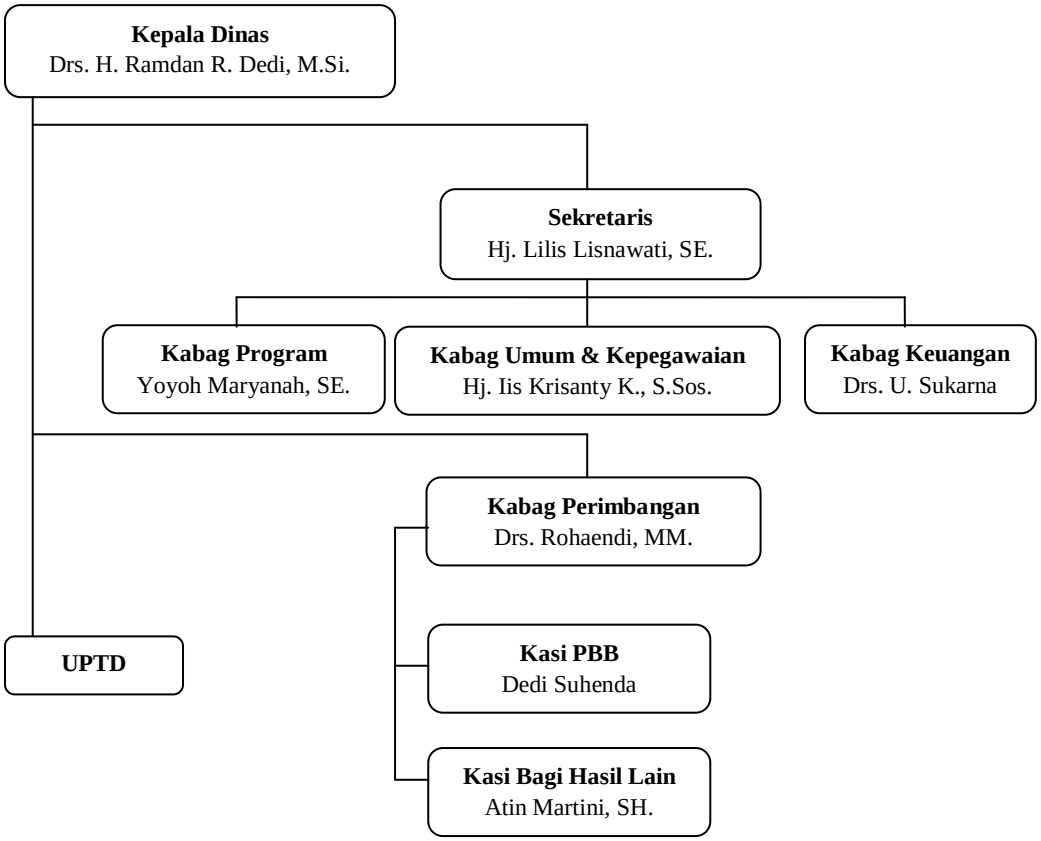
Seiring dengan adanya keputusan baru dari Bupati Sumedang, maka pada tahun 2008 Dinas Pajak Kabupaten Sumedang berganti nama kembali menjadi Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang yang di sah kan dengan Perda No.8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta unsur Dinas Pendapatan diatur dalam keputusan Bupati No. 17 tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan strktural pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang.

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan terdiri atas:

1. Kepala Dinas Pendapatan, bertugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan.
2. Sekretariat, bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang ketataussahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja dinas.
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penyuluhan.
4. Bidang Penetapan dan Penagihan, bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan yang meliputi bidang penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah**.**
5. Bidang Perimbangan, bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bagi Hasil dan lain-lain pendapatan dengan penyusun pedoman dan petunjuk teknis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas pendapatan Kabupaten Sumedang

4.1.1.3 Uraian Tugas

1. Kepala Dinas Pendapatan

a. Menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas.

b. Merumuskan perencanaan, pengendalian, pendataan dan pengembangan operasional dalam bidang pendapatan.

c. Mengawasi kegiatan pendaftaran, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta bagi hasil pajak.
d. Merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
e. Mengendalikan penyelesaian permasalahan pengelolaan pendapatan daerah.
f. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan bidang pendapatan.
g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

a. Merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dinas.
b. Merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian dinas.
c. Merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas.
d. Merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas.
e. Merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas.
f. Merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas.
g. Merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja dinas.
h. Merumuskan sistem informasi dinas.
i. Merumuskan laporan kegiatan/kinerja dinas.

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

a. Merumuskan pendataan dan pengembangan potensi pendapatan daerah.

b. Merumuskan bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daeerah bersama instansi terkait.

c. Menyiapkan bahan dan data dalam penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan di Bidang Pendaftaran dan Pendataan pajak daerah.

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

e. Mengendalikan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah.

f. Menevaluasi hasil kegiatan seksi Pendaftaran dan Pendataan.

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

4. **Bidang Penetapan dan Penagihan**

a. Merumuskan petunjuk teknis pembinaan pengembangan di Bidang Penetapan dan Penagihan.

b. Mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Penetapan dan Penagihan.

c. Merumuskan bahan dalam melaksanakan perumusan pajak dan bukan pajak atau retribusi yang dihasilkan.

d. Mengendalikan pelaksanaan penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

5. **Bidang Perimbangan**

a. Merumuskan ptunjuk teknis pembinaan pengemabangan di Bidang Perimbangan.

b. Mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Perimbangan.

c. Mengendalikan pelaksanaan koordinasi pengeloalaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d. Bagi Hasil Pajak dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

4.1.1.4 Aktivitas Perusahaan

Aktivitas yang dilaksanakan oleh Dipenda Kabupaten Sumedang adalah :

1. Menyiapkan, menyerahkan, menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak atau yang diberi kuasa.
2. Menyiapkan, menyerahkan, menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran.

3. Kegiatan penetapan yaitu dengan proses perhitungan penetapan besarnya pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
4. Kegiatan penyetoran dilakukan melalui pemegang kas pembantu.
5. Kegiatan angsuran dan penundaan pembayaran dilakukan dengan mengadakan penelitian, membuat surat pernyataan, membuat surat persetujuan dan menyerahkan kepada wajib pajak.
6. Kegiatan yang dilaksanakan dalam keberatan dan banding yang diajukan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.
7. Kegiatan penagihan dengan membuat, membatalkan, menerbitkan, menyerahkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S).
8. Kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
9. Kegiatan pengembalian kelebihan pembayaran dengan melakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas dan wajib pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan pada DPPKAD Kabupaten Sumedang selama periode tahun 2001-2010 menggunakan data tahunan. Sebelum membahas pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal, terlebih dahulu akan dibahas perkembangan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal selama periode 2001-2010.

4.2.1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipunggut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Pajak daerah, Retribusi Daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah. Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah hasil berupa uang maupun barang yang dijadikan sebagai kekayaan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan masyarakat dikota. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

Tabel 4.1

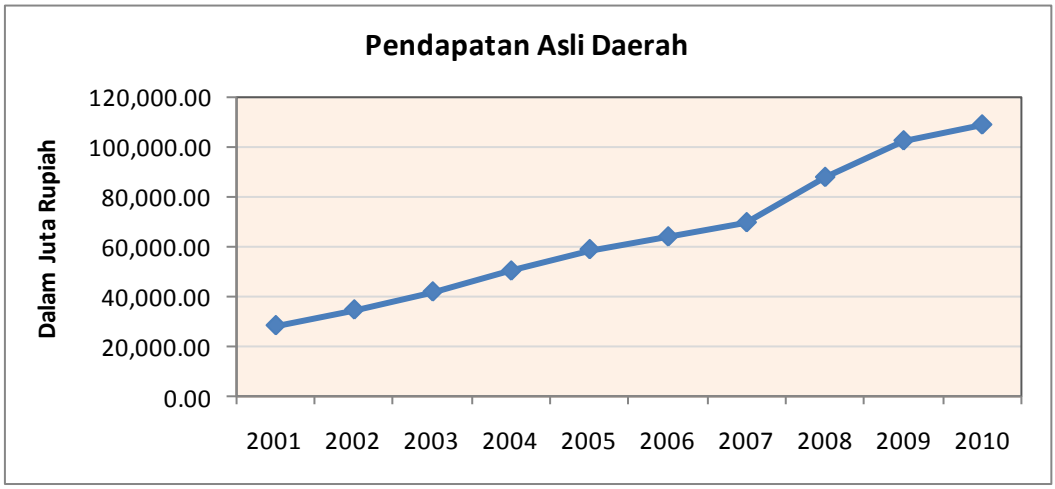
Perkembangan Pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang

Tahun	Pendapatan asli daerah	Perkembangan	Pertumbuhan
2001	28,241,122,190.26		
2002	34,539,056,123.76	6,297,933,933.50	22.30%
2003	41,752,447,482.17	7,213,391,358.41	20.88%
2004	50,118,894,987.70	8,366,447,505.53	20.04%
2005	58,699,239,115.74	8,580,344,128.04	17.12%
2006	63,800,280,473.00	5,101,041,357.26	8.69%
2007	69,493,500,676.00	5,693,220,203.00	8.92%
2008	87,633,522,120.38	18,140,021,444.38	26.10%
2009	102,288,540,254.00	14,655,018,133.62	16.72%
2010	108,658,025,581.20	6,369,485,327.20	6.23%
	Rata-Rata	**8,935,211,487.88**	**16.33%**

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.1 dapat dilihat pendapatan asli daerah yang berhasil dihimpun Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan dari tahun 2001

hingga tahun 2010. Bila dilihat dari perkembangannya, pendapatan asli daerah yang dihimpun Pemerintah Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp 8,935,211,487 setiap tahun dengan pertumbuhan sebesar 16,33% setiap tahun. Secara visual atau dapat digambarkan perkembangan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 4.1

Perkembangan Pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang

Pada grafik terlihat dengan jelas bahwa pendapatan asli daerah yang berhasil dihimpun Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dikarenakan adanya sarana mobilitas bagi petugas dalam hal meningkatkan pembinaan kepada para wajib pajak atau badan untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan itu akan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

4.2.1.2 Perkembangan Dana alokasi umum Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Dari hasil penelitian diperoleh gambaran dana alokasi umum pada Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

Tabel 4.2

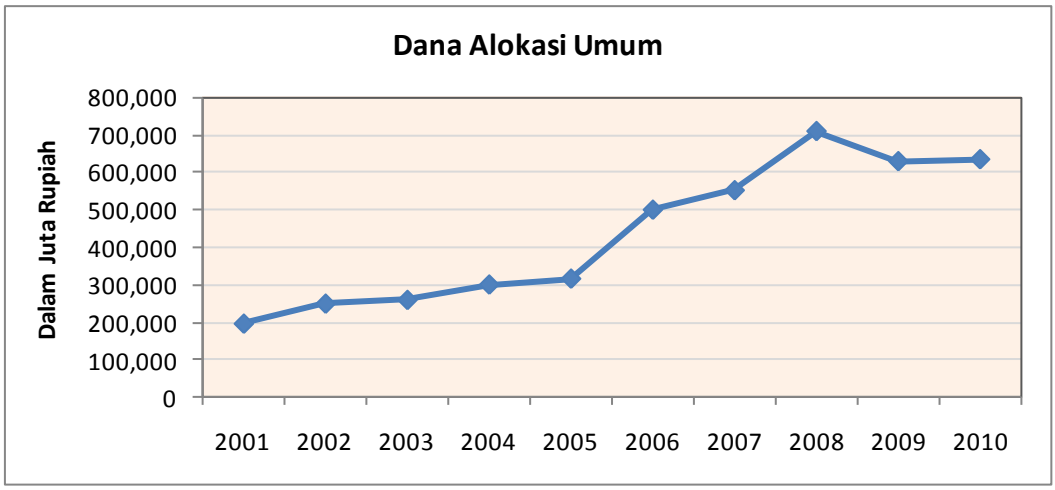
Perkembangan Dana alokasi umum Pada Pemerintah Kabupaten Sumedang

Tahun	Dana alokasi umum	Perkembangan	Pertumbuhan
2001	197,085,048,000		
2002	250,270,000,000	53,184,952,000	26.99%
2003	260,219,996,602	9,949,996,602	3.98%
2004	301,089,000,000	40,869,003,398	15.71%
2005	316,798,000,000	15,709,000,000	5.22%
2006	500,020,000,000	183,222,000,000	57.84%
2007	551,751,000,000	51,731,000,000	10.35%
2008	708,993,532,000	157,242,532,000	28.50%
2009	629,006,913,000	-79,986,619,000	-11.28%
2010	634,169,767,000	5,162,854,000	0.82%
	Rata-Rata	**48,564,968,778**	**15.34%**

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.2 dapat dilihat dana alokasi umum Pemerintah Kabupaten Sumedang cenderung meningkat dari tahun 2001 hingga tahun 2010, hanya pada tahun 2009 dana alokasi umum Pemerintah Kabupaten Sumedang sempat mengalami penurunan. Bila dilihat dari perkembangannya, dana alokasi umum pada Pemerintah Kabupaten Sumedang secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar Rp 48,564,968,778 setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan 15,34%.

Secara visual perkembangan dana alokasi umum pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 4.2

Perkembangan Dana alokasi umum di Pemerintah Kabupaten Sumedang

Pada grafik terlihat dengan jelas bahwa dana alokasi umum pada Pemerintah Kabupaten Sumedang cenderung meningkat setiap tahunnya. Dana alokasi umum merupakan dana yang bersifat umum yang jumlahnya sangat signifikan dimana penggunannya menjadi kewenangan daerah.

Terdapat beberapa tahun realisasi dana alokasi umum yang mengalami kenaikan secara signifikan diantaranya dri tahun 2006-2008, hal itu terjadi dikarenakan fungsi dana alokasi umum yang dananya dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sehingga pemerintah pusat memberikan dana yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya.

4.2.1.3 Perkembangan Belanja modal Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Berikut perkembangan belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumedang selama periode tahun 2001-2010 :

Tabel 4.3

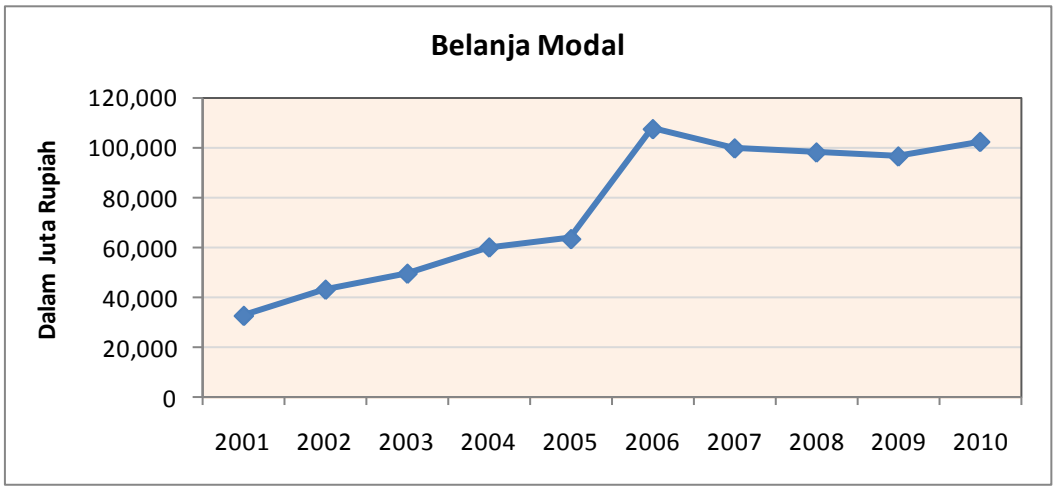
Perkembangan Belanja modal Pemerintah Kabupaten Sumedang

Tahun	Belanja Modal	Perkembangan	Pertumbuhan
2001	32,968,334,853		
2002	43,449,904,769	10,481,569,917	31.79%
2003	49,843,467,615	6,393,562,846	14.71%
2004	60,348,715,298	10,505,247,683	21.08%
2005	63,694,885,316	3,346,170,018	5.54%
2006	107,722,507,735	44,027,622,419	69.12%
2007	99,994,029,492	-7,728,478,243	-7.17%
2008	98,371,710,147	-1,622,319,345	-1.62%
2009	96,777,123,501	-1,594,586,646	-1.62%
2010	102,602,892,282	5,825,768,781	6.02%
	Rata-Rata	**7,737,173,048**	**15.32%**

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.3 terdapat belanja modal Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan dari tahun 2001 hingga tahun 2006, namun pada tahun 2007 hingga tahun 2009 belanja modal Pemerintah Kabupaten Sumedang mengalami penurunan. Bila dilihat dari perkembangannya, belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp

7,737,173,048 setiap tahun dengan pertumbuhan 15,32% setiap tahunnya. Secara visual perkembangan belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 4.3

Perkembangan Belanja modal Pemerintah Kabupaten Sumedang

Pada grafik terlihat anggaran belanja modal Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan hingga tahun 2006, namun pada tahun 2007 hingga tahun 2009 mengalami penurunan dikarenakan hampir 75% dana yang ada dialokasikan untuk belanja operasi diantaranya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Secara rata-rata belanja modal mengalami peningkatan setiap tahunya, tetapi realisasi belanja modal tersebut selalu lebih rendah dari dana yang telah dianggarkan dikarenakan pada realisasinya ada beberapa *asset* yang sudah dimiliki seperti tanah, bangunan, kendaraan, perlengkapan yang setiap tahunnya tidak harus dibeli sehingga anggaran untuk *asset* tersebut tidak direalisasikan dan

juga disebabkan dengan tingginya belanja modal tersebut akan mengakibatkan biaya rutin lainnya seperti biaya pemeliharaan menjadi lebih tinggi.

4.2.2 Hasil Analisis Kuantitatif

4.2.2.1 Pengaruh Pendapatan asli daerah dan Dana alokasi umum Terhadap Belanja modal.

Setelah diuraikan gambaran data variabel penelitian, selanjutnya untuk menguji apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal maka dilakukan pengujian statistik, baik secara simultan maupun parsial. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS.15. dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini.

4.2.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Estimasi model regresi linier berganda ini menggunakan software SPSS.15 dan diperoleh hasil output sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15723095505	1E+010		1.528	.170
	PAD	-.045	.386	-.044	-.115	.911
	DAU	.144	.056	.966	2.556	.038

a. Dependent Variable: Belanja

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Dari tabel diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

$Y = 15723095505 - 0{,}045\ X_1 + 0{,}144\ X_2$

Dimana :

Y = Belanja modal (Belanja)

X_1 = Pendapatan asli daerah (PAD)

X_2 = Dana alokasi umum (DAU)

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar Rp 15,723,095,505 menunjukkan rata-rata belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumedang selama periode tahun 2001-2010 jika pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sama dengan nol.
2. Pendapatan asli daerah memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 0,045, artinya setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1 juta rupiah diprediksi akan menurunkan belanja modal sebesar 45 ribu rupiah, dengan asumsi dana alokasi umum tidak berubah.
3. Dana alokasi umum memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,144, artinya setiap peningkatan dana alokasi umum sebesar 1 juta rupiah diprediksi akan meningkatkan belanja modal sebesar 144 ribu rupiah dengan asumsi pendapatan asli daerah tidak berubah.

4.2.2.3 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini keempat asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu (berganda) dan data yang dikumpulkan mengandung unsur deret waktu (10 tahun pengamatan).

1) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi.

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

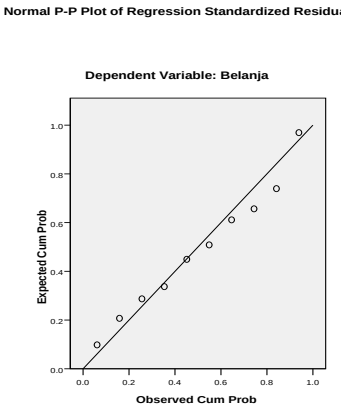
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000023
	Std. Deviation	10714099527
Most Extreme Differences	Absolute	.134
	Positive	.134
	Negative	-.083
Kolmogorov-Smirnov Z		.422
Asymp. Sig. (2-tailed)		.994

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Pada tabel 4.4 dapat dilihat nilai probabilitas (sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,994. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut :



Gambar 4.2
Grafik Normalitas

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.143	6.976
	DAU	.143	6.976

a. Dependent Variable: Belanja

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.5 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.6 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error).

Tabel 4.7

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

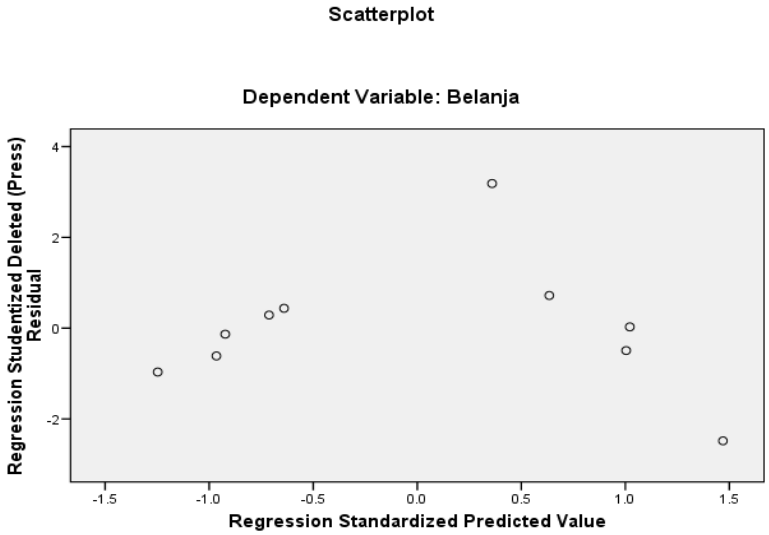
Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	-.103
		Sig. (2-tailed)	.777
		N	10
	DAU	Correlation Coefficient	.042
		Sig. (2-tailed)	.907
		N	10

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.6 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), dimana nilai signifikansi (sig) dari masing-masing koefisien

korelasi kedua variabel bebas dengan nilai absolut error (0,777 dan 0,907) masih lebih besar dari 0,05.



Gambar 4.3

Grafik Heteroskedastisitas

4) Uji Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regressi dan berikut nilai Durbin-Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regressi.

Tabel 4.8

Nilai Durbin-Watson Untuk Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.926[a]	.857	.816	1.215E+010	1.257

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 1,257, sementara dari tabel d untuk jumlah variabel bebas = 2 dan jumlah pengamatan n = 10 diperoleh batas bawah nilai tabel (d_L) = 0,697 dan batas atasnya (d_U) = 1,641. Karena nilai Durbin-Watson model regressi (1,257) berada diantara d_L (0,697) dan d_U (1,641), yaitu daerah tidak ada keputusan. Untuk memastikan ada tidaknya autokorelasi maka pengujian dilanjutkan menggunakan *runs test* (Gujarati,2003;465). Hasil pengujian menggunakan *runs test* dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9

Hasil Runs Test Untuk Memastikan Ada Tidaknya Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value[a]	-645537292.2
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	4
Z	-1.006
Asymp. Sig. (2-tailed)	.314

a. Median

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Melalui hasil *runs test* pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji Z (0,314) dan masih lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan tidak terdapat autokkorelasi pada model regressi.

Setelah keempat asumsi regressi diuji dan tidak terjadi pelanggan, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, yaitu pengaruh pendapatan asli daerah dan *dana alokasi umum* terhadap belanja modal.

4.2.2.4 Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen (pendapatan asli daerah dan *dana alokasi umum*) dengan belanja modal. Melalui korelasi parsial akan dicari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap belanja modal ketika variabel independen lainnya dianggap konstan.

a. Korelasi Pendapatan asli daerah Dengan Belanja modal Ketika Dana alokasi umumTidak Berubah

Koefisien korelasi antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal ketika dana alokasi umum tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10

Koefisien Korelasi Parsial Pendapatan asli daerah Dengan Belanja modal

Correlations

Control Variables			Belanja	PAD
DAU	Belanja	Correlation	1.000	-.044
		Significance (2-tailed)	.	.911
		df	0	7
	PAD	Correlation	-.044	1.000
		Significance (2-tailed)	.911	.
		df	7	0

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal ketika dana alokasi umum tidak berubah adalah sebesar 0,044 dengan arah negatif. Artinya hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja modal sangat lemah ketika dana alokasi umum tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika pendapatan asli daerah meningkat, sementara dana alokasi umum tidak berubah maka akan menurunkan belanja modal. Kemudian besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal ketika dana alokasi umum tetap adalah $(-0{,}044)^2 \times 100\% = 0{,}2\%$.

b. Korelasi Dana alokasi umum Dengan Belanja modal Ketika Pendapatan asli daerah Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara *dana alokasi umum* dengan belanja modal ketika pendapatan asli daerah tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11

Koefisien Korelasi Parsial Dana alokasi umum Dengan Belanja modal

Correlations

Control Variables			Belanja	DAU
PAD	Belanja	Correlation	1.000	.695
		Significance (2-tailed)	.	.038
		df	0	7
	DAU	Correlation	.695	1.000
		Significance (2-tailed)	.038	.
		df	7	0

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja modal ketika pendapatan asli daerah tidak berubah adalah sebesar 0,695 dengan arah positif. Artinya hubungan dana alokasi umum dengan belanja modal termasuk kuat ketika pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika dana alokasi umum meningkat, sementara pendapatan asli daerah tidak berubah maka akan meningkatkan belanja modal perusahaan. Kemudian besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal ketika pendapatan asli daerah tetap adalah $(0,695)^2 \times 100\% = 48,3\%$.

4.2.2.5 Koefisien Korelasi Berganda

Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukan kekuatan hubungan antar kedua variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel belanja modal. Hubungan korelasi secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12

Analisis Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.926[a]	.857	.816	1.215E+010	1.257

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Berdasarkan data pada tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi ganda adalah sebesar 0,857 (R) yang berada antara 0,80 - 1,00, artinya pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan belanja modal.

4.2.2.6 Koefisien Determinasi

Nilai korelasi *r* hanya menyatakan erat atau tidaknya hubungan antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Oleh karena itu untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal, digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Adapun rumus dari koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

$Kd = r^2 \times 100\%$

$Kd = (0{,}926)^2 \times 100\%$

$Kd = 0{,}8574 \times 100\%$

Kd = 857% (pembulatan)

Sedangkan hasil perhitungan dengan mengunakan SPSS.15 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.926[a]	.857	.816	1.215E+010	1.257

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.12 tepatnya dilihat dari nilai R Square yaitu sebesar 0,857 atau 85,7%, artinya pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan terhadap belanja modal sebesar 85,7% sedangkan sisanya yaitu 14,3% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini yaitu pembentukan dana cadangan dan pemberian pinjaman daerah.

4.2.2.7 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS.15. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

   $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$: Menunjukkan variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

   $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$: Menunjukan variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap variabel belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

b. Menentukan tingkat signifikansi

   Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (k; n-k-1) df= 2;7. Pada tabel F untuk $df_1 = 2$, $df_2 = 7$, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 4,737.

c. Mencari nilai F_{hitung}

   Dengan bantuan software SPSS v.15, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari F_{hitung} sebagai berikut :

Tabel 4.14
Anova Untuk Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.2E+021	2	3.089E+021	20.932	.001[a]
	Residual	1.0E+021	7	1.476E+020		
	Total	7.2E+021	9			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Pada tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 20,932.

d. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

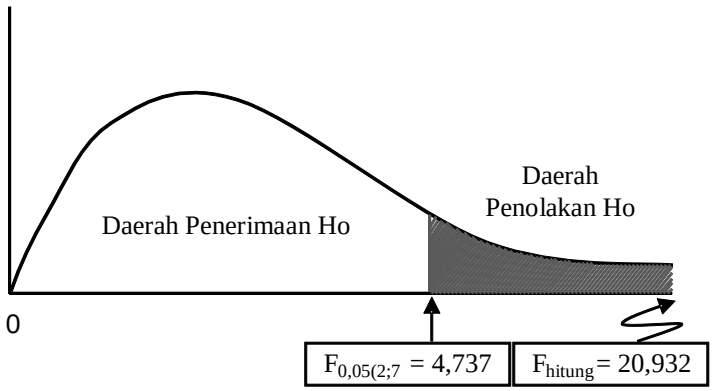
Jika $F_{hitung} < F_{tabel,}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (20,932 > 4,737), maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kedua variabel bebas, yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selain itu peneliti juga melakukan pengujian dengan cara melihat tingkat signifikansi yang dapat dilihat pada tabel 4.13.

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,001, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari pendapatan asli daerah dan

dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.5

Daerah Penolakan H_0 Pada Pengujian Secara Bersama-sama

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena F_{hitung} sebesar 20,932 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

4.2.2.8 Pengaruh Pendapatan asli daerah dan Dana alokasi umum Secara Parsial Terhadap Belanja modal.

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai

nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,365 yang diperoleh dari tabel t pada α = 0.05 dan derajat bebas 7 untuk pengujian dua pihak. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15

Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15723095505	1E+010		1.528	.170
	PAD	-.045	.386	-.044	-.115	.911
	DAU	.144	.056	.966	2.556	.038

a. Dependent Variable: Belanja

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2011

Nilai statistik uji t yang terdapat pada tabel 4.14 selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk menentukan apakah variabel yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak.

1) Pengaruh Pendapatan asli daerah Secara Parsial Terhadap Belanja modal.

Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_1 = 0$: Menunjukan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

$H_a : \beta_1 \neq 0$: Menunjukan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 10-2-1= 7, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,365.

c. Mencari nilai t_{hitung}

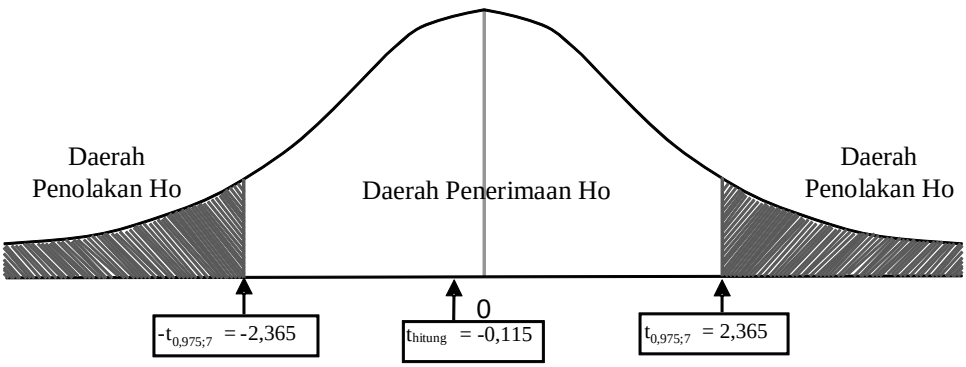
Dengan bantuan software SPSS.15, seperti terlihat pada tabel 4.14 diperoleh nilai t_{hitung} variabel pendapatan asli daerah sebesar -0,115

d. Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-0,115 < 2,365), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.6

Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Pendapatan asli daerah Terhadap Belanja modal

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Ho diterima, karena t_{hitung} sebesar -0,115 berada pada daerah penerimaan Ho, yang berarti bahwa pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja modal pada Pemerintah Kota Bandung.

2) Pengaruh Dana alokasi umum Secara Parsial Terhadap Belanja modal.

Untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

Hipotesis kedua

$H_0 : \beta_2 = 0$: Menunjukkan bahwa dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

$H_a : \beta_2 \neq 0$: Menunjukkan bahwa dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap variabel belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 10-2-1= 7, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,365.

c. Mencari nilai t_{hitung}

Dengan bantuan software SPSS.15, seperti terlihat pada tabel 4.14 diperoleh nilai t_{hitung} variabel dana alokasi umum sebesar 2,556.

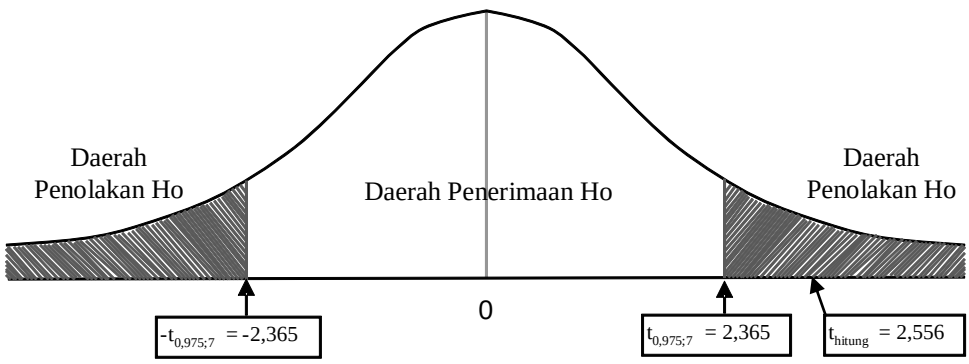
d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,556 > 2,365), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.7

Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Dana alokasi umum Terhadap Belanja modal

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.7 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 2,556 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dengan demikian bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh besar terhadap belanja modal walaupun setiap tahunnya pendapatan asli daerah mengalami peningkatan tetapi dananya masih tidak mencukupi untuk membiayai belanja modal sedangkan dana alokasi umum sangat berpengaruh terhadap belanja modal kaena sumber dananya mutlak dari pemerintah pusat dan jauh lebih besar dari pendapatan asli daerah maka dana tersebut mampu membiayai semua belanja-belanja termasuk belanja modal.

Jika secara bersama-sama pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memberikan peranan sebesar 85,7% terhadap belanja modal, maka dari itu menunjukkan bahwa secara bersama-sama pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:46) yang menyatakan bahwa PAD dan DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD dan DAU yang didapat daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang dikeluarkan daerah.